

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi tantangan serius bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terdapat korelasi negatif yang signifikan antara tingkat kemiskinan dengan kesejahteraan masyarakat, di mana peningkatan angka kemiskinan berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan sosial. Menurut Sumodiningrat (2007), kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya.

Kemiskinan yang berkelanjutan memberikan dampak berantai pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti, rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas, terbatasnya peluang kerja dan pengembangan usaha, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, terhambatnya mobilitas sosial vertikal. Chambers (1983) memperkuat argumentasi ini dengan konsep "perangkap kemiskinan" (*poverty trap*) yang menjelaskan bagaimana berbagai faktor saling terkait dan mempertahankan kondisi kemiskinan dalam suatu masyarakat.

Di Indonesia, upaya pengentasan kemiskinan telah menunjukkan hasil positif, dimana tingkat kemiskinan nasional mengalami penurunan signifikan dari 9,36% pada tahun 2023 menjadi 9,03% pada Maret 2024. Penurunan ini merupakan capaian terendah dalam satu dekade terakhir yang didukung oleh berbagai program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Yogyakarta, sebagai salah satu daerah istimewa di Indonesia juga menghadapi berbagai masalah sosial yang kompleks. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, khususnya, menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sebagai Provinsi termiskin di Pulau Jawa, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

juga mencatatkan perbaikan signifikan dalam penanganan kemiskinan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di DIY pada September 2024 tercatat sebesar 10,40%, turun 0,43 poin persen dibandingkan Maret 2024. Meskipun masih di atas rata-rata nasional sebesar 8,57%, tren penurunan ini menunjukkan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di DIY lima tahun belakangan ini. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul pada tahun 2022 mencapai 130,13 ribu jiwa. Angka ini mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada tahun 2021 tercatat sebesar 146,98 ribu jiwa dan mengalami penurunan menjadi 126,93 ribu jiwa pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul menunjukkan progres positif dalam pengentasan kemiskinan.

Pada tingkat lokal, Kelurahan Potorono, Kecamatan Banguntapan, menunjukkan bahwa sekitar 26% penduduk atau sebanyak 3.274 jiwa (995 kepala keluarga) tergolong miskin pada tahun 2020 (Kelurahan Potorono, 2020). Dusun Nglaren, salah satu wilayah di Potorono, menjadi contoh nyata tantangan tersebut. Masyarakat di wilayah ini sebagian besar bergantung pada sektor informal, seperti buruh tani, pedagang kecil, dan pekerja serabutan. Pendapatan yang tidak menentu serta minimnya keterampilan usaha menjadi hambatan besar dalam upaya keluar dari kemiskinan. Selain itu, faktor lain seperti rendahnya akses modal, keterbatasan jaringan pemasaran, dan minimnya literasi digital turut memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, konsep kesejahteraan sosial tidak hanya mencakup aspek material semata, tetapi juga meliputi dimensi spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap warga negara dapat hidup layak dan mengembangkan diri secara optimal. Friedlander (1980) memperkuat konsep ini dengan mendefinisikan kesejahteraan

sosial sebagai sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator kunci yaitu, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek spiritual.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan pandangan Suharto (2009) yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial mencakup tiga konsepsi utama: kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial, serta aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sosial.

Implementasi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul mencerminkan konsepsi upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut Kepala Bappeda Bantul, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar 104 miliar rupiah untuk program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Suharto (2019) menegaskan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan serangkaian aktivitas terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengimplementasikan 25 program pengentasan kemiskinan yang mencakup program padat karya infrastruktur, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pelayanan kesehatan gratis, program boga sehat, dan pelatihan kewirausahaan bagi warga miskin. Program-program ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan.

Salah satu inovasi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah pembentukan

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). WKSBM merupakan program yang diimplementasikan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 42/HUK/2004 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2019. Program ini dibentuk di setiap pedukuhan melalui berbagai kegiatan pelayanan sosial yang ditujukan khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat) merupakan salah satu program pemerintah yang berlandaskan pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 42/HUK/2004 tentang Pedoman Pembentukan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. Program ini hanya diterapkan secara formal di dua provinsi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Jawa Tengah. Pada mulanya, DIY menjadi daerah perintis yang mengimplementasikan WKSBM sebagai strategi inovatif untuk menanggulangi masalah sosial sekaligus menekan angka kemiskinan melalui pendekatan berbasis komunitas. Lahirnya WKSBM di DIY tidak terlepas dari kuatnya tradisi gotong royong dan kelembagaan sosial lokal yang telah mengakar, serta kebutuhan pemerintah daerah untuk mencari model pemberdayaan masyarakat yang lebih partisipatif pada akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Gagasan ini kemudian diperkuat dengan hadirnya regulasi dari Kementerian Sosial tahun 2004, sehingga DIY menjadi pionir terbentuknya WKSBM di Indonesia.

Keberhasilan DIY dalam menjalankan program ini terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat, penguatan modal sosial, serta berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi produktif di tingkat lokal. Dampak positif inilah yang kemudian mendorong Provinsi Jawa Tengah untuk mengadopsi WKSBM sebagai model pemberdayaan masyarakat yang dianggap efektif dalam memperkuat kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin. Dengan demikian,

WKSBM tidak hanya menjadi sarana pengentasan kemiskinan, tetapi juga wadah pembangunan sosial yang memadukan kebijakan pemerintah dengan nilai gotong royong dan swadaya masyarakat yang sudah mengakar kuat di kedua wilayah tersebut.

Jim Ife (2018) menekankan bahwa pengembangan masyarakat harus bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dalam menangani permasalahan sosial dan mengembangkan potensi lokal. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kolaboratif dalam pelayanan sosial yang tumbuh dari akar rumput masyarakat. Konsep ini dibangun dari pemikiran Jim Ife yang menekankan bahwa WKSBM merupakan institusi sosial komunitas yang terbentuk dari jaringan hubungan sosial antar individu yang terorganisir secara sistematis.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyono (2016) mengungkapkan bahwa program pemberdayaan masyarakat terbukti efektif dalam membuka lapangan kerja baru, memperbaiki infrastruktur, menyediakan modal pinjaman, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Temuan ini memperkuat pentingnya peran WKSBM sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 42/HUK/2004, menguraikan WKSBM sebagai sistem kerja sama antar keperangkat pelayanan sosial yang mencakup usaha kelompok, lembaga, dan jaringan pendukungnya. Sistem ini dapat tumbuh secara alamiah maupun dibentuk secara terstruktur oleh masyarakat di tingkat lokal, dengan tujuan utama melaksanakan tugas-tugas di bidang kesejahteraan sosial berbasis nilai sosial, kepedulian sosial, dan jaringan sosial sebagai modal sosial.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2020, WKSBM dibentuk di setiap Pedukuhan melalui berbagai kegiatan pelayanan sosial yang ditujukan khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pembentukan WKSBM ini melibatkan dua jenis kelompok sosial, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal

mencakup entitas yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti kelompok Rukun Tetangga, kelompok Pedukuhan, kelompok Pengembangan dan Kesejahteraan Keluarga, kelompok Karang Taruna, dan kelompok Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa. Sementara itu, kelompok informal merujuk pada kelompok-kelompok lokal yang dibentuk atas inisiatif masyarakat sendiri, di luar kelompok formal yang telah disebutkan. Pendekatan ini memungkinkan WKSBM untuk memanfaatkan struktur sosial yang sudah ada sekaligus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas dan fleksibel dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

Struktur organisasi WKSBM dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan, dan muatan lain yang ada di Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2020, struktur organisasi WKSBM terdiri dari beberapa komponen penting. Lurah Desa berperan sebagai Pelindung/Penanggung Jawab, sementara Ketua Badan Permusyawaratan Desa bertindak sebagai Penasehat. Struktur inti WKSBM meliputi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Selain itu, terdapat beberapa seksi yang berperan penting dalam pelaksanaan tugas WKSBM, minimal terdiri dari Seksi Pendataan, Seksi Penggalangan Dana, Seksi Penyaluran Dana, dan Seksi Hubungan Masyarakat

WKSBM telah membuktikan efektivitasnya sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial di tingkat dasar, sebagaimana terlihat dari perkembangannya di Kabupaten Bantul, khususnya di Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Pajangan yang masing-masing memiliki 11 WKSBM aktif. WKSBM bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri serta merancang solusi untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat atau daerah.

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial keluarga miskin. Melalui pemberdayaan yang

dilakukan oleh Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan lebih baik dan berkelanjutan. Penelitian oleh Galih Rezha Mayangsari dan Pandhu Yuanjaya (2025) menunjukkan bahwa WKSBM berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat, terutama keluarga miskin, dengan mengacu pada empat indikator utama: upaya pengentasan kemiskinan, pemenuhan kesehatan, pemenuhan pendidikan, dan peningkatan produktivitas. Selanjutnya, penelitian Anis Hariyanisyah dan Trisanti (2020) di Dusun Kunden, Kelurahan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul menegaskan bahwa WKSBM memiliki peran besar dalam mengatasi kemiskinan melalui berbagai program non-formal (tidak terstruktur), seperti gotong royong dan pembangunan fasilitas umum. Selain itu, program formal (terstruktur) seperti bantuan rumah tidak layak huni, jambanisasi, lantainisasi, bantuan listrik, serta pengumpulan dana sosial 500 rupiah per keluarga juga berkontribusi dalam pemberdayaan keluarga miskin.

Hasil penelitian Widodo (2020) di Dusun Kunden, Sendangsari, Pajangan, Bantul menunjukkan bagaimana WKSBM Sehat Sejahtera berhasil mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif. Program-program ini terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa WKSBM (Wahana Kesejahteraan Berbasis Masyarakat).

Penelitian yang dilakukan oleh Aminah dan Prasetyo (2018) menegaskan bahwa keberhasilan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) sangat dipengaruhi oleh penerapan model komunikasi *multitrack*, yaitu suatu pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program, mulai dari penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Model ini memungkinkan terciptanya proses pemberdayaan yang lebih efektif karena memperhatikan faktor internal, seperti motivasi, latar belakang pendidikan, dan keterampilan masyarakat, serta faktor eksternal,

seperti dukungan kebijakan pemerintah dan ketersediaan sumber daya pendukung. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Warsi (2020) di Desa Merdikorejo yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap program WKSBM tergolong sangat tinggi, didorong oleh kesadaran akan pentingnya tujuan yang ingin dicapai. Namun demikian, penelitian tersebut juga menggarisbawahi bahwa masih terdapat kelemahan pada aspek perencanaan dan ketersediaan sarana pendukung, yang jika tidak segera diatasi dapat menghambat keberlanjutan dan optimalisasi hasil pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan konteks pemberdayaan yang dilakukan WKSBM Ngudi Barokah, di mana keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan sistemik yang memadai untuk mencapai kemandirian keluarga miskin secara berkelanjutan.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat berperan besar dalam menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program salah satunya adalah pemberdayaan keluarga miskin. Sejalan dengan pelaksanaan pemberdayaan oleh WKSBM Ngudi Barokah, efektivitas program sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap prosesnya, serta adanya dukungan yang terstruktur dan berkesinambungan guna mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga miskin secara berkelanjutan.

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena fokusnya yang lebih spesifik pada program pemberdayaan WKSBM terhadap keluarga miskin dan bukan dampak program terhadap Kesejahteraan sosial masyarakat secara luas, dan melihat dari sudut pandang pekerjaan sosial serta memiliki *output* rancangan program yang menjadi usulan dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Dengan menekankan pada aspek pemberdayaan, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana program-program tersebut dapat meningkatkan keterampilan, dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi keluarga miskin.

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Ngudi Barokah, yang berdiri pada tahun 2009 di Dusun Nglaren, Kelurahan Potorono, merupakan salah satu pusat kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dan berkelanjutan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Bantul (2024), WKSBM ini termasuk ke dalam 85 WKSBM aktif yang terdaftar, serta menjadi salah satu dari tiga WKSBM unggulan di Kecamatan Banguntapan. Prestasi yang diraih meliputi Juara 4 dalam Lomba WKSBM Berprestasi Tingkat DIY pada tahun 2014 dan Juara 1 pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, WKSBM Ngudi Barokah juga menerima kunjungan Tim Evaluasi Provinsi DIY sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap kontribusinya dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat komunitas.

Secara operasional, WKSBM Ngudi Barokah menjalankan program pemberdayaan dalam tiga fase berjenjang. Pertama, tahap jangka pendek berupa penyaluran bantuan sembako secara rutin, seperti distribusi 75 paket pada Desember 2021. Kedua, tahap jangka menengah melalui pemberian beasiswa pendidikan dan modal usaha mikro nirlaba. Ketiga, tahap jangka panjang yang difokuskan pada peningkatan keterampilan warga, antara lain pelatihan pengolahan makanan dan pelatihan jahit-menjahit. Seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan produktivitas masyarakat.

Melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh WKSBM, keluarga miskin di Dusun Nglaren dapat mengakses berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Program-program ini mencakup pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan alat produksi. Salah satu aspek penting dari pemberdayaan ini adalah pelatihan keterampilan yang diberikan kepada anggota masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga dan pemuda. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang tertentu, seperti menjahit dan pengolahan makanan, tetapi juga membuka peluang usaha baru. Dengan pemberdayaan, banyak anggota masyarakat berhasil meningkatkan kesejahteraan mereka.

Manfaat dari program-program yang dijalankan oleh WKSBM Ngudi Barokah dapat

dirasakan secara nyata oleh masyarakat Dusun Nglaren, khususnya bagi keluarga miskin yang menjadi fokus utama pemberdayaan. Salah satu dampak positif yang paling signifikan dari program jangka panjang adalah tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha warga yang sebelumnya masih berskala kecil, bahkan ada yang belum memiliki usaha sama sekali. Data menunjukkan bahwa dari 75 penerima manfaat program pemberdayaan keluarga miskin, sebanyak 59 orang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya melalui usaha yang dijalankan. Selain itu, terdapat 8 orang yang usahanya tidak hanya berkembang, tetapi juga mampu melakukan diversifikasi ke bidang lain, sehingga menambah sumber pendapatan baru. Sementara itu, 8 orang lainnya menghadapi kendala sehingga usahanya belum berjalan optimal atau bahkan terhenti. Temuan ini membuktikan bahwa program pemberdayaan keluarga miskin melalui WKSBM Ngudi Barokah cukup efektif dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta memperbaiki kualitas hidup keluarga miskin di Dusun Nglaren.

Hal ini terutama dipicu oleh bantuan alat bantu produksi yang diberikan oleh WKSBM Ngudi Barokah, yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk usaha mereka. Dengan adanya alat produksi yang memadai, para pelaku usaha mikro dan rumah tangga dapat memaksimalkan potensi ekonominya, sehingga mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peningkatan keterampilan melalui pelatihan yang menyertai pemberian alat produksi turut memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha mereka. Secara keseluruhan, program jangka panjang yang dilaksanakan oleh WKSBM Ngudi Barokah tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga menciptakan transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat kemandirian ekonomi keluarga miskin di Dusun Nglaren. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan yang menyeluruh dan berbasis potensi lokal dapat menjadi strategi efektif dalam usaha pengentasan kemiskinan di

tingkat komunitas.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di atas, WKSBM Ngudi Barokah telah menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan dampak positif bagi warga Dusun Nglaren Kelurahan Potorono. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana proses WKSBM Ngudi Barokah dalam memberdayakan keluarga miskin dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek pemberdayaan sosial yang diterapkan oleh WKSBM menggunakan konsep mengenai proses pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sulistiyani (2004). Proses tersebut mencakup penyadaran, peningkatan keterampilan, dan peningkatan kemandirian, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Sejauh penelusuran peneliti, kajian dari penelitian-penelitian terdahulu belum secara khusus membahas aspek-aspek tersebut, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami praktik pemberdayaan yang dilakukan WKSBM Ngudi Barokah sehingga dapat memperoleh manfaat bagi masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: “bagaimana proses pemberdayaan keluarga miskin melalui Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Ngundi Barokah di Dusun Nglaren Kelurahan Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul?” Untuk mendapatkan gambaran terkait aspek-aspek tersebut peneliti akan membahas pokok-pokok permasalahan berikut:

1. Bagaimana penyadaran keluarga miskin melalui Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKSBM) Ngundi Barokah di Dusun Nglaren Kelurahan Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana peningkatan keterampilan keluarga miskin melalui Wahana Kesejahteraan

Sosial berbasis Masyarakat (WKSBM) Ngundi Barokah di Dusun Nglaren Kelurahan Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul?

3. Bagaimana peningkatan kemandirian keluarga miskin melalui Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKSBM) Ngundi Barokah di Dusun Nglaren Kelurahan Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pemberdayaan keluarga miskin melalui Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKSBM) Ngundi Barokah di Dusun Nglaren Kelurahan Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul untuk mendeskripsikan:

1. Kesadaran keluarga miskin melalui Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKSBM) Ngundi Barokah di Dusun Nglaren Kelurahan Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
2. Peningkatan keterampilan keluarga miskin melalui Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKSBM) Ngundi Barokah di Dusun Nglaren Kelurahan Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
3. Peningkatan kemandirian keluarga miskin melalui Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKSBM) Ngundi Barokah di Dusun Nglaren Kelurahan Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang ditinjau dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kontribusi pada pengembangan ilmu pekerjaan sosial tentang model pemberdayaan berbasis komunitas khususnya dalam praktik pemberdayaan melalui WKSBM.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi rekomendasi yang bermanfaat kepada Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dalam melaksanakan program-program kesejahteraan sosial khususnya pemberdayaan keluarga miskin.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi disusun secara individu berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL Pada bagian ini berisi tentang teori yang relevan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN Pada bagian ini berisi tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.